

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2023 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara 53418
distankankp.banjarnegarakab.go.id email: distankankp@banjarnegarakab.go.id**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati (Perbub) Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara berdampak pada perubahan dalam Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Yang semula Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan berdiri sendiri digabung menjadi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan dan KP) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang perikanan, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan perlu merubah Rencana strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2022

sehingga perlu disusun Rencana Strategis Sementara untuk Tahun 2023 -2026

Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dan sebagai salah satu materi yang akan dibahas pada Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) setiap tahunnya, untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selain itu, Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja pada Dinas yang bersangkutan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Pertanian Perikanan Ketahanan Pangan (Dintankan dan KP) juga perlu melakukan penyesuaian Program dan Kegiatan yang diawali dengan pemetaan Program dan Kegiatan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 14. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 16. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya pertanian berkelanjutan ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
 42. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 43. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
 44. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 46. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan;
 47. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

49. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
50. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan;
51. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
53. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
54. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
56. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Berkelanjutan
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
58. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
59. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang
60. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 -2024;
61. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang

- penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
62. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
 63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
 66. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
 67. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 68. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 210);
 69. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 232);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
71. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 - 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan pangan selama kurun waktu tahun 2023 - 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan kurun waktu tahun 2019-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan pangan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 -2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 - 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang perikanan, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang perikanan, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

kebijakan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

3. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan.

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari dua seksi yaitu :

- 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan serta pengelolaan budi daya pertanian bidang tanaman pangan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah.

- 2) Seksi Usaha Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangbidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan.

4. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, serta pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura dan perkebunan.

Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari dua seksi yaitu :

- 1) Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana produksi pertanian,

pengembangan prasarana produksi pertanian, dan pengelolaan budidaya pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah bidang hortikultura dan perkebunan.

- 2) Seksi Usaha Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana usaha pertanian, pengembangan prasarana usaha pertanian, penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang hortikultura dan perkebunan.

5. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan

hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bisang peternakan.

Bidang Peternakan terdiri dari dua seksi yaitu :

- 1) Seksi Produksi, Pengembangan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah,

pengembangan lahan penggembalaan umum, dan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah, pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan usaha pertanian bidang peternakan.

- 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer dan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan, fasilitas rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.

6. Bidang Ketahanan pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor

sesuai kewenangan Daerah, pengelolaan cadangan pangan, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, dan penanganan kerawanan pangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah, pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan sumber daya lokal, serta pengawasan keamanan pangan.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari tiga seksi yaitu :

- 1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, pengelolaan cadangan pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pengadaan, serta pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.

- 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan sumber daya lokal.
- 3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengawasan keamanan pangan dan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, dan penanganan kerawanan pangan Daerah.

7. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ pasar ikan, penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan.

Bidang Perikanan terdiri dari dua seksi yaitu :

- 1) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

- 2) Seksi Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan /pasar ikan, penerbitan rekomendasi Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan ada 4 UPTD yaitu :

- 1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan benih ikan.
- 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan mempunyai tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan kesehatan hewan dan inseminasi buatan.
- 3) UPTD Balai Benih dan Laboratorium Pertanian mempunyai tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan benih dan laboratorium pertanian.

- 4) UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan rumah potong hewan.

9. Jabatan Fungsional

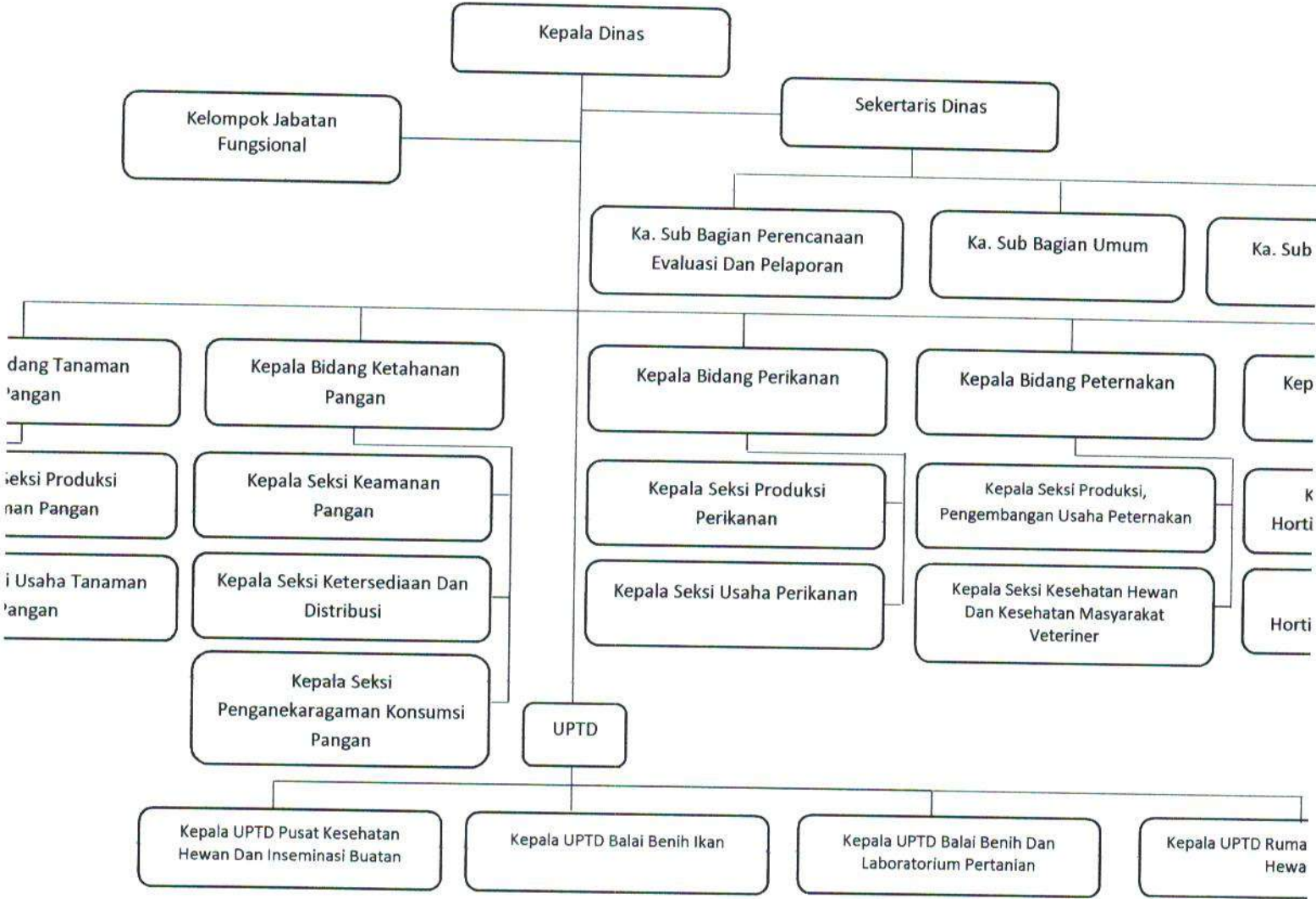
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Distankan dan KP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 2. Seksi Usaha Tanaman Pangan;
- d. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan; dan
 2. Seksi Usaha Hortikultura dan Perkebunan;
- e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi, Pengembangan dan Usaha Peternakan; dan
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- f. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Perikanan; dan
 - 2. Seksi Usaha Perikanan;
- g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - 1. UPTD Balai Benih Ikan
 - 2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan
 - 3. UPTD Balai Benih dan Laboratorium Pertanian
 - 4. UPTD Rumah Potong Hewan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

ar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2021 sebanyak 222 orang, terdiri dari 135 PNS dan 87 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 105 orang, dan SMA Sederajat sejumlah 78 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SMP Sederajat	2	1	3
2	SMA Sederajat	31	47	78
3	D3	17	13	30
4	S1	79	26	105
5	S2	6	-	6
6	S3	-	-	
	Jumlah	135	87	222

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 66 orang pada tahun 2021, seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No.	Golongan/ status	Jumlah
1	PNS Golongan I	-
2	PNS Golongan II	35
3	PNS Golongan III	66
4	PNS Golongan IV	34
5	PPPK Golongan I	-
6	PPPK Golongan II	42
7	PPPK Golongan III	20
8	PPPK Golongan IV	-
9	PTT	11
10	THL	14
	Jumlah Total	222

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara meliputi tanah, alat angkutan, alat bengkel/ ukur, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio, alat kesehatan, alat laboratorium, bangunan gedung, jalan/ jembatan, bangunan air/ irigasi dan peralatan instalasi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021

No Urut	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang	Harga
1	Alat Pendingin (AC Unit)	28	Baik	146,811,500
2	Af Generator Tone Generator	1	Baik	11,000,000
3	Alat Dapur Lain-lain	146	Baik	26,530,000
4	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	53	Baik	166,850,900
5	Alat Kedokteran Bedah Lain-Lain	24	Baik	24,536,000
6	Alat Komunikasi Lain-lain	56	Baik	25,139,000
7	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	1,339	Baik	1,358,508,650
8	Alat Panen Lain-lain	56	Baik	258,914,000
9	Alat Pembersih Lain-lain	8	Baik	4,521,200
10	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	1	Baik	175,000
11	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	226	Baik	264,863,000
12	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	8,500,000
13	Alat Pengolah Data	20	Baik	96,898,125
14	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	6	Baik	181,422,090

15	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	1	Baik	16,600,000
16	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	77	Baik	87,755,000
17	Alat Perontok Mesin (Power Thresher)	2	Baik	32,900,500
18	Alat Processing Lain-lain	60	Baik	4,683,477,776
19	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	982	Baik	11,703,100
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	95	Baik	110,750,947
21	Alat Timbangan Biasa Lain-lain	5	Baik	13,930,300
22	Alat Ukur Kadar Air	3	Baik	13,314,000
23	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	34	Baik	103,359,200
24	Alat-alat Peternakan Lain-lain	1	Baik	16,550,000
25	Alat Bantu	2	Baik	968,300
26	Alat studio audio	14	Baik	39,913,202
27	Alat Bengkel mesin	1	Baik	1,135,000
28	Amplifier	1	Baik	5,225,000
29	Analitical Balance	1	Baik	19,800,000
30	Autoclave	2	Baik	4,500,000
31	Automatic Timer	2	Baik	1,215,000
32	Bak Penampung/Kolam Ukur	2	Baik	231,103,000
33	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Umum	1	Baik	50,660,000
34	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	62	Baik	22,777,960,546
35	Bangunan Gudang Lain-lain	5	Baik	2,141,855,653

36	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen	2	Baik	536,520,000
37	Bangunan Kesehatan Lain-lain	2	Baik	186,528,000
38	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1	Baik	499,279,800
39	Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain-lain	4	Baik	247,731,000
40	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	2	Baik	104,777,000
41	Bangunan Pembawa Air KOTOR Lain-lain	1	Baik	21,662,000
42	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	4	Baik	179,204,800
43	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	2	Baik	129,625,000
44	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	33	Baik	7,963,681,502
45	Binatang Ikan Lain-lain	800	Baik	13,760,000
46	Brand Kas	1	Baik	24,453,000
47	Buffet Kayu	1	Baik	450,000
48	Buret/Peralatan Titrasi	2	Baik	3,600,000
49	Camera + Attachment	29	Baik	112,268,125
50	Camera Electronic	2	Baik	15,367,500
51	Cawan Patri	12	Baik	1,278,000
52	Cold Room Storage	1	Baik	3,478,500
53	Cold Storage (Kamar Pendingin)	1	Baik	7,600,000
54	Compact Disc. Player	1	Baik	730,000
55	Container	6	Baik	125,010,000
56	Copy Board/Elektrik White Board	3	Baik	3,630,000

57	Corong	3	Baik	804,000
58	Display	4	Baik	36,649,300
59	DO Meter	2	Baik	12,460,000
60	Durian	35	Baik	11,200,000
61	Electric Generating Set Lain-lain	2	Baik	91,490,000
62	Elemeyer Glass	16	Baik	1,825,200
63	Erlenmeyer Plastik	20	Baik	1,732,000
64	Exhause Fan	3	Baik	1,098,000
65	External	1	Baik	875,000
66	Facsimile	1	Baik	3,950,000
67	Filling Besi/Metal	40	Baik	118,675,000
68	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik	82,597,500
69	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	2	Baik	929,027,000
70	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	5	Baik	2,013,563,000
71	Gelas Takar/ ukur	25	Baik	672,000
72	Gelas Ukur		Baik	5,762,500
73	Global Positioning System	2	Baik	10,078,000
74	Hard Disk	1	Baik	9,300,000
75	Instalasi Air Bersih Lain-lain	1	Baik	14,610,000
76	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1	Baik	5,000,000
77	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1	Baik	16,101,000

78	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2	Baik	27,176,000
79	Jalan Khusus Lain-lain	13	Baik	778,672,179
80	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	Baik	20,499,000
81	Jaringan Sambungan Rumah Kapasitas Kecil	1	Baik	1,190,000
82	Kasur	8	Baik	7,986,000
83	Kelapa	82	Baik	16,400,000
84	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	5	Baik	118,680,000
85	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	7	Baik	127,778,000
86	Kipas Angin	6	Baik	1,952,000
87	Kolam Pasang	1	Baik	781,078,000
88	Kompas Gas	19	Baik	8,055,000
89	Kursi Kerja	1,380	Baik	443,330,855
90	Alat Pengolahan- panen	7	Baik	104,950,000
91	Alat Studio Pemetaan	3	Baik	55,200,000
92	Alat Kedokteran poliklinik	2	Baik	903,900
93	Labu Takar	2	Baik	
94	Lacto Meter	1	Baik	
95	Lain-lain	20	Baik	
96	Lap Top	52	Baik	
97	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	Baik	
98	Lemari Besi	17	Baik	

99	Lemari Es	2	Baik	
100	Lemari Kaca	14	Baik	
101	Lemari Kayu	24	Baik	
102	Lensa Kamera	7	Baik	
103	Loudspeaker	2	Baik	
104	Megaphone	2	Baik	
105	Meja Kerja	215	Baik	
106	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik	
107	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Baik	
108	Mesin Hitung Manual	8	Baik	
109	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Baik	
110	Mesin Penghisap Debu	1	Baik	
111	Mesin Potong Rumput	7	Baik	
112	Mesin Stensil Listrik Folio	2	Baik	
113	Meubelair Lainnya	5	Baik	
114	Micro Pippetes	34	Baik	
115	Microphone	2	Baik	
116	Microphone/Wireless Mic	22	Baik	
117	Micropipette	1	Baik	
118	Microscope Binokular	1	Baik	
119	Moisture Tester	2	Baik	

120	Monitor	3	Baik	
121	Note Book	30	Baik	
122	Off Air TV Monitor	1	Baik	
123	P.C Unit	57	Baik	
124	Papan Nama Instansi	1	Baik	
125	Papan Pengumuman	47	Baik	
126	Papan Visuil	4	Baik	
127	Pembakar Spirtus	3	Baik	
128	Penanggas	1	Baik	
129	Pengaduk	10	Baik	
130	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	35	Baik	
131	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	1	Baik	
132	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	15	Baik	
133	Peralatan studio Video dan film A Lain-lain	97	Baik	
134	Perkakas Bengkel Lain-lain	1	Baik	
135	Perkebunan Lain-lain	4	Baik	
136	Personal Komputer Lain-lain	7	Baik	
137	Pesawat Telephone	1	Baik	
138	PH Meter	6	Baik	
139	Pinset	40	Baik	
140	Pipet	239	Baik	

141	Pompa Kebakaran	1	Baik	
142	Printer	69	Baik	
143	Proyektor + Attachment	7	Baik	
144	Rak Besi/ Metal/ Kayu	29	Baik	
145	Rak Tabunga Reaksi	5	Baik	
146	Rambutan	88	Baik	
147	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	5	Baik	
148	Saluran Induk	16	Baik	
149	Scanner	1	Baik	
150	Sepeda Motor	180	Kurang Baik	
151	Slide Projector	1	Baik	
152	Sofa	2	Baik	
153	Sound System	2	Baik	
154	Station Wagon	12	Kurang Baik	
155	Stetoscope	3	Baik	
156	Storage Modul Unit	1	Baik	
157	Suction Needle (2.6 MM dia)	10	Baik	
158	Tabung Gas	1	Baik	
159	Tabung Reaksi	127	Baik	
160	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14	Baik	
161	Tanaman Holtikultura Lain-lain	3	Baik	

162	Tangga Alumunium	6	Baik	
163	Tanggul Banjir	3	Baik	
164	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	4	Baik	
165	Thermometer	6	Baik	
166	Timbangan	11	Baik	
167	Timbangan Badan	1	Baik	
168	Timbangan BBI Kapasitas 100 Kg	1	Baik	
169	Timbangan Cepat Kapasitas 10 Kg	2	Baik	
170	Timbangan Cepat Kapasotas 100 Kg	2	Baik	
171	Traktor Tangan dengan peralatannya	72	Baik	
172	Trocart	1	Baik	
173	Tugu Peringatan Lainnya	1	Baik	
174	Unit Power Supply	5	Baik	
175	USG	1	Baik	
176	Video Monitor	1	Baik	
177	Waduk Air Bersih/Air Baku Lain-lain	3	Baik	
178	Zice	50	Baik	
179	Video Monitor	1	Baik	
180	Waduk Air Bersih/Air Baku Lain-lain	3	Baik	
181	Zice	50	Baik	
182	Alat Kedokteran gigi	3	Baik	

183	Peralatan komputer lainnya	8	Baik	
184	Alat laboratorium pertanian	49	Baik	

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 - 2021.

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 - 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2021			Realisasi Capaian Tahun 2019 -2021			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar										
1	- Produksi padi	ton	159.662,89	160.461,21	161.263,51	170.541,70	171.146,00	169.853,00	106.8	106.66	105,33
2	- Produksi Jagung	ton	66.454,41	67.118,96	67.790,15	50.645,24	63.108,00	51.949,82	76,21	94,02	76,63
3	- Produksi Kedelai	ton	195,31	244,14	305,18	1.979,30	821,90	838,40	1013	336,65	208,22
4.	- Produksi Ubi Kayu	ton	216.363,21	85.910,30	220.712,11	80.910,30	102.655	130.274,21	37,39	140,87	59,02
5.	Produksi Tanaman Hortikultura										
6.	- Durian	ton	4.601,56	4.831,64	5.073,22	9.525,20	11.684,00	6.736,30	206,99	241,82	127,97

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2021			Realisasi Capaian Tahun 2019 -2021			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
7.	- Salak	ton	254.323,23	259.182,91	267.282,34	350.011,10	376.343,80	360.212,60	137,62	145,20	134,77
8.	- Pisang	ton	9.888,80	11.074,01	11.414,72	20.367,10	24.884,30	25.614,00	205,96	224,71	224,39
9.	- Kentang	ton	128.700,00	132.600,00	140.400,00	113.498,20	126.092,50	116,392,90	88,19	95,09	82,90
	Jumlah Populasi Ternak										
10	- Sapi	ekor	31.695	31.885	32.076	26.776	29.049	30.943	84,48	91,11	96,47
11	- Kambing/domba	ekor	262.348	263.873	263.398	255.033	265.571	279.392	97,21	100,64	104,81
12.	- Domba batur a	ekor	8.750	9.000	9.250	8.140	9.471	9.471	93,028	105,23	102,39
13.	Produksi perkebunan										
14.	Kopi (ton)		1.051,00	1.051,50	1.053	1.153,89	1.025,65	2.332,73	109,79	88,89	221,53
	Kopi Robusta (ton/ha)	ton	0	0	0	165,58	167,57	1.579,60			
	Kopi Arabika (ton/ha)	ton	0	0	0	988,31	858,08	753,13			
15.	Kelapa Dalam (ton/ha)	ton	9.070,30	9.088,60	9.107,00	11.184,20	12.178,69	13.240,23	123,30	133,99	145,38

Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2021			Realisasi Capaian Tahun 2019 -2021			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
16.	Kelapa Deres (ton/ha)	ton	10.291,20	10.329,20	10.360,90	9.806,08	11.602,29	6.584,62	95,29	112,32	63,55
17.	Teh (ton/ha)	ton	2.003,50	2.010,50	2.017,60	2.546,87	2.614,04	2.486,81	127,12	130,01	123,25
	Tembakau (ton)	Ton	133,10	133,60	134,30	201,30	304,00	230,77	151,24	227,54	171,83
18.	Lada (ton/ha)	ton	119,25	120,50	121,00	136,67	172,65	170,63	125,0	189,5	203,13
19.	Cakupan bina kelompok petani	%	90	90	90	25,00	35,7	145,0	-	109,36	
20.	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	31.481	34.629	38.092	31.570,00	34.977	38.287,62	100,28	101,00	100,50
21.	Produksi benih ikan (ekor)	Ekor	2.079.900.000	2.287.890.000	2.516.679.000	2.117.529.600	2.323.434.000	2.519.655.019	10,81	101,55	100,12
22.	Produksi perikanan tangkap (ton)	ton	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.251,21	1.384	1.253,238	100,09	110,72	100,26
23.	Meningkatnya ketersediaan, cadangan dan		159.662,89	160.461,21	161.263,51	170.541,70	171.146	169.855	106,81	105,85	105,33

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2021			Realisasi Capaian Tahun 2019 -2021			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	distribusi pangan (kg)										
24.	Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)		80	85	95	140,80	144.30	127,85	176	169,76	134,58
25.	Penyediaan cadangan pangan kabupaten (%)		17	19	21	44,00	26.16	21,79	258,82	137,68	103,76
26.	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan		90	92	93	91,50	91,60	89	101,66	99,56	95,69
27.	Meningkatnya cakupan mutu dan keamanan pangan (%)		77	80	82	77,20	90,55	84,21	100,26	113.19	102,69

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2021			Realisasi Capaian Tahun 2019 -2021			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
28.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai)		72	74	76	82,28	79,28	79,28	114,27	107,135	104,31
29.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (%)		58 (CC)	63 (B)	68 (B)	69,17	68,63	68,63	119,25	108,93	100,92

Capaian kinerja produktivitas tanaman pangan padi mengalami penurunan di tahun 2021. Namun penurunan capaian tidak terlalu signifikan. Dari tahun 2021 capaian mencapai 106,66% dan menurun menjadi 105,33%. Dari tahun 2019-2021 produktivitas selalu mengalami kenaikan dan selalu melebihi target. Produktivitas jagung dari tahun 2019-2020 tidak pernah mencapai target. Tahun 2020 capaian produktivitas jagung meningkat dari tahun 2019 yaitu mencapai 94,02. Namun di tahun 2021 capaian produktivitas jagung hanya mencapai 76,63%. Produktivitas komoditas pangan kedelai dari tahun 2019-2021 selalu melampaui target. Target dan capaian dari tahun 2019-2021 selalu mengalami kenaikan.

Kinerja produktivitas hortikultura buah-buahan yang telah melampaui target kinerja yang ditetapkan adalah produktivitas durian, salak dan pisang. Capaian kinerja produktivitas durian adalah sebesar 127,97%. Untuk komoditas hortikultura pisang sudah sangat memenuhi target yaitu mencapai 224,39%. Sedangkan produktivitas salak juga sudah melampaui target yaitu mencapai 134,77 di tahun 2021. Produktivitas kentang tercapai 82,90 %.

Produktivitas Durian Kabupaten Banjarnegara selama 5 (lima) tahun telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD namun memiliki kecenderungan turun produktivitasnya. Realisasi produktivitas salak apabila dibandingkan dengan target produktivitas selama lima tahun relatif baik karena mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Kinerja produktivitas pisang selama lima tahun tercatat sangat baik dapat dilihat dari produktivitas pisang yang telah mencapai target produksi yang ditetapkan. Terlihat bahwa kecenderungan produktivitas pisang semakin meningkat. Produktivitas kentang selama lima tahun belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat disinyalir telah terjadi degradasi lahan yang menyebabkan penurunan produksi yang signifikan. Kecenderungan peningkatan produktivitas disebabkan karena penggunaan varietas baru kentang yang cukup baik seperti Tedjo MZ yang lebih tahan terhadap serangan penyakit.

Pencapaian produksi peternakan di Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan beberapa indikator produksi sapi, Kambing/domba, dan domba batur. Apabila kita membandingkan data tahun 2019 dan 2021 komoditas ternak yang mengalami peningkatan populasi adalah sapi dan kambing. Populasi ternak sapi tahun 2020 meningkat sebanyak 6,63 persen dan meningkat 5,36% di tahun

2021. Sedangkan ternak kambing meningkat capaiannya sebanyak 3,43 persen pada tahun 2020 dan meningkat 4,17 di tahun 2021.

Populasi ternak yang mengalami penurunan capaian di tahun 2021 adalah domba batur. Populasi ternak domba batur mengalami penurunan sebanyak 2,84% apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Kecenderungan yang makin turun populasi ternak domba dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian yang serius agar populasi dapat dipertahankan bahkan dapat meningkat.

Produktivitas beberapa jenis komoditas perkebunan menunjukkan peningkatan seperti Kopi, Kelapa Dalam, Tebu, Teh, Tembakau, dan lada. Hanya produktivitas kelapa Deres menunjukkan penurunan. Produksi perkebunan pada tahun 2021 untuk Kopi sebesar 2.332,73 ton, Kelapa Dalam 13.240,23 ton, Kelapa Deres 6.584,62 ton, Teh 2.486,81 ton, Tembakau 230,77 ton, dan Lada 170,63. Realisasi produktivitas kopi selama kurun waktu tahun 2019-2021 mengalami penurunan dan terjadi kenaikan yang signifikan di tahun 2021. Realisasi produktivitas kelapa dalam selama kurun waktu tahun 2019 dan 2021 terlihat meningkat dari target Renstra/ RPJMD, Realisasi produktivitas kelapa deres selama kurun waktu tahun 2019 dan 2020 terlihat meningkat dibandingkan target Renstra/ RPJMD, namun tahun 2021 mengalami penurunan capaian yaitu hanya 63,55 %. Realisasi produktivitas teh selama kurun waktu tahun 2019 sampai 2021 terlihat realisasi lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra/RPJMD. Realisasi produktivitas Tembakau pada tahun 2019 dan 2021 terlihat realisasi lebih. Realisasi produktivitas Lada pada tahun 2019 sampai 2021 terlihat realisasi lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra/ RPJMD.

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja tahun 2019 - 2021 semua indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam rangka pencapaian target tersebut berbagai upaya dan strategi telah dilakukan untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang tersedia setiap saat, beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi

penganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, sehingga meningkatkan perekonomian keluarga, dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

Trend produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 -2021 selalu melampaui target, dimana produksi tahun 2019 sebanyak 31.570 dari target 31.481 ton, tahun 2021 produksi 34.977 ton dari target 34.629 ton dan tahun 2021 mencapai 38.287,62 ton dari target 38.092. Produksi benih ikan dari tahun 2019-2021 juga selalu melampaui target dimana capaian ditahun 2019 sebesar 100,81, tahun 2020 mencapai 101,55% dan tahun 2021 mencapai 100,12%. Produksi perikanan tangkap juga mengalami kenaikan produktivitas dan selalu melampaui target dari tahun 2019-2021. Produksi perikanan tangkap tahun 2019 mencapai 100,09%, tahun 2020 mencapai 110,72% dan tahun 2021 mencapai 100,26%.

Beberapa kegiatan yang dilakukan guna menunjang pencapaian target tersebut adalah :

- 1) Adanya pembinaan dan pelatihan dalam rangka ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada kelompok binaan.
- 2) Adanya pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
- 3) Adanya monitoring dan evaluasi yang terkait dengan ketersediaan pangan di daerah.
- 4) Pembinaan dan pemantauan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, Kelompok Ternak dan kelompok Perikanan telah dilakukan secara rutin.
- 5) Pemantauan harga di tingkat konsumen/pedagang dan di tingkat petani/produsen dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali pada komoditas antara lain sebagai berikut : beras, cabe merah, telur, daging ayam, daging sapi, bawang merah, gula pasir, minyak goreng, terigu, jagung, kedelai, kacang tanah, bawang putih, ubi kayu, ubi jalar, leye, ikan asin.
- 6) Subsidi beras pada saat pasar murah menjelang bulan Ramadhan.
- 7) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar.
- 8) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- 9) Fasilitasi peningkatan produksi dan produktivitas;

- 10) Fasilitasi alat mesin pertanian;
 - 11) Fasilitasi pengembangan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian,
- Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan 2018 - 2022 mendapat dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten. Realisasi anggaran yang digunakan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 - 2022

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	6.211.991.500	5.352.356.000	1.461.461.900			5.720.123.354	5.108.285.749	1.417.241.068			92,08	95,44	96,97		
2	Program Pengembangan Budaya Perikanan	2.144.086.450	1.651.046.010	1.446.257.011			1.962.951.280	1.539.325.548	1.418.829.564			91,55	93,23	98,10		
3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	100.000.000	350.000.000	88.755.650			95350000	324.396.134	88.755.650			95,35	92,68	100		
4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	39.677.000					34.653.462					87,34				
5	Program Pengembangan Kawasan Budaya Laut, Air Payau dan Air Tawar															
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.598.063.000	2.075.524.000	1.933.748.934			1.405.664.570	1.617.591.333	1.396.000.546			87,96	77,94	72,19		
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	280.693.000	442.900.000	185.232.500			253.560.925	401.096.644	184.649.825			90,33	90,56	99,69		
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.925.000	20.077.000	7.500.000			13.040.000	9.995.000	7.500.000			62,32	49,98	100		
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	69.878.000	349.031.000	60.000.000			42.333.000	309.511.450	44.435.000			60,58	88,68	74,06		

Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
10	Program Peningkatan Pemasaan Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	124.740.000	445.000.000	61.000.000			102.261.450	305.730.039	60.988.475			81,98	68,70	99,98		
11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan															
12	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	877.396.000	622.790.000	1.526.125.000			826.942.300	533.704.550	1.443.308.250			94,25	85,70	94,57		
13	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	394.743.000	280.000.000	49.513.000			360.124.700	152.490.584	47.693.000			91,23	54,46	96,57		
14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	207.566.500	162.330.000	161.899.500			193.242.122	144.746.702	135.196.850			93,10	89,17	83,51		
15	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.071.462.000	3.442.444.000	153.044.150			977.324.900	3.149.762.560	150.331.713			91,21	91,50	98,23		
16	Program Peningkatan Pemasaan Hasil Produksi Peternakan															
17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	77.368.000	170.000.000	107.999.115			77.326.200	153.623.950	105.824.115			99,95	90,37	98,74		
18	Program Pengembangan Budaya Pertanian, Peternakan dan Perikanan	300.000.000	630.840.000	350.000.000			283.425.400	518.654.350	276.542.800			94,48	82,22	92,18		
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	44.220.000					32.777.000					72,12				
20	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA				136.992.500	1.083.210.826				111.190.100					81,16	

Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN															
21	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				482.034.180	422.507.500					389.408.380				80,78	
22	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				39.796.800						33.789.950				84,91	
23	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				50.640.000	62.739.500					40.189.660				79,36	
24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.593.640.400	875.915.000					1.544.149.480				97,52	
25	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				64.942.400	157.500.000					63.638.720				97,99	
26	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				42.644.500						41.000.250				96,14	
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.434.050.924	23.223.875.164					18.209.408.345				93,70	
28	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.313.869.450	3.511.176.650					1.334.380.831				57,67	

Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
29	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				20.295.526.800	42.415.069.974				17.525.796.722					86,35	
30	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				135.797.850					10.668.850					78,55	
31	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				210.555.300					140.000.000					66,49	
32	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				2.342.367.550	1.913.859.000				1.899.102.235					81,08	

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat menjadi tantangan dalam memproduksi bahan pangan yang cukup.
- 2) Ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan untuk perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya.
- 3) Ancaman perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.
- 4) Berkurangnya tenaga muda di sektor pertanian atau dengan kata lain sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus, lebih memilih bekerja pada sektor industri dan sektor lainnya.
- 5) Lokasi pertanian dan perkebunan terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga menyebabkan biaya angkut tinggi dan kurang efisien, sementara harga pangan tidak stabil.
- 6) Pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi tanpa memperhatikan mutu, sehingga harga yang diterima petani relatif rendah.
- 7) Pola pangan masyarakat yang mengarah pada jenis komoditas pangan tertentu menjadi tantangan dalam diversifikasi pangan.
- 8) Kebiasaan masyarakat yang menganggap ternak sebagai komoditas yang sifatnya sebagai tabungan yang mudah untuk diuangkan sehingga menyebabkan mutasi ternak

terjadi cukup tinggi. Sewaktu-waktu dengan mudah untuk dijual terutama pada saat musim tanam dimulai, atau pada saat usaha ternak lainnya gagal/sedang mengalami kerugian dan saat dimulainya tahun ajaran baru serta hari-hari besar.

- 9) Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat terhadap layanan Kesehatan hewan - kesehatan masyarakat veteriner
- 10) Beberapa daerah di Jateng masih endemis penyakit hewan menular (Anthrax, Brucellosis, Hog cholera, Rabies, Avian Influenza), mobilisasi ternak sangat bebas antar kabupaten, dan adanya Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis)
- 11) Terjadinya pendangkalan di waduk dan aliran sungai, serta pola tangkap yang tidak ramah lingkungan yang mempengaruhi penurunan produksi perikanan.
- 12) Laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi mengancam ketersediaan pangan daerah.
- 13) Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan.
- 14) Belum efisiennya distribusi pangan.
- 15) Skor pola pangan harapan belum maksimal (capaian sampai dengan 2021, 89%) sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal.
- 16) Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal;
- 17) Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan.

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

- 1) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.
- 2) Adanya berbagai program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membangun bendungan, jaringan irigasi dan merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.
- 3) Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik memberikan peluang dalam pengembangan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.
- 4) Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.
- 5) Revitalisasi cadangan pangan masyarakat.
- 6) Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan.
- 7) Peluang yang besar untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dengan meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan
- 8) Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam serta tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan, tetapi belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 9) Tersedianya potensi pangan lokal yang masih dapat dikembangkan secara optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 - 1) Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan subsidi pupuk, karena distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan, dosis yang tidak tepat sesuai yang dianjurkan, pengguna subsidi yang tidak tepat.
 - 2) Petani banyak menggunakan benih yang tidak layak (kurang bermutu).
 - 3) Kurang memadainya sarana produksi pertanian, dan distribusi tidak merata.
 - 4) Harga sarana produksi pertanian yang tinggi.
 - 5) Infrastruktur pertanian (irigasi, jalan usaha tani, sumber-sumber air embung, dam parit) masih kurang memadai dibandingkan kebutuhannya.
 - 6) Petani belum menerapkan pola tanam secara tertib dalam rangka pencegahan serangan OPT.
 - 7) Kurangnya ketersediaan sarana penanggulangan bencana pertanian berupa kekeringan.
 - 8) Kewenangan yang terbatas terkait Penerbitan izin usaha pertanian.
 - 9) Terjadinya degradasi lahan pertanian.

- 10) Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.
 - 11) Mutu produk pertanian masih belum sesuai dengan standar/permintaan pasar.
 - 12) Pendapatan petani masih rendah.
 - 13) Ketersediaan data pertanian dan perikanan yang tidak selalu up to date dan valid.
 - 14) Kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian masih perlu ditingkatkan.
 - 15) Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat praktek budidaya pertanian yang tidak ramah lingkungan .
 - 16) SDM petani yang masih rendah sehingga menyulitkan dalam proses transfer teknologi
 - 17) Fluktuasi harga produk pertanian yang tinggi.
 - 18) Kepemilikan lahan rata-rata yang rendah
- b. Permasalahan terkait bidang peternakan
- 1) Mutu benih/bibit ternak masih kurang berkualitas.
 - 2) Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan, termasuk petugas pengawasan
 - 3) Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual ternak fluktuatif
 - 4) Belum berkembangnya wilayah sumber bibit
 - 5) Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
 - 6) Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
 - 7) Tenaga teknis pelayanan keswan-kesmavet tidak memadai dari sisi
 - a) Perbandingan antar satuan ternak maupun unit usaha menjadi obyek pelayanan dengan petugas keswan kesmavet.

- b) Kualifikasi petugas sesuai peraturan yang berlaku.
- 8) Peraturan mengenai pelayanan keswan kesmavet belum diterapkan secara maksimal
- 9) Belum ada ketentuan tarif pelayanan
- 10) Belum semua kecamatan memiliki tempat pelayanan keswan-kesmavet
- 11) Belum ada pengawasan terhadap ancaman penyakit hewan menular strategis akibat lalu lintas ternak antar kabupaten.
- c. Permasalahan terkait bidang perikanan
 - 1) Pendapatan nelayan kecil masih rendah.
 - 2) Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - 3) Degradasi ekosistem perairan umum, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan perairan umum dan usaha pembudidayaan ikan.
 - 4) Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB).
 - 5) Sumberdaya air terbatas dan konflik kepentingan dengan usaha pertanian.
 - 6) Kualitas benih ikan masih kurang.
 - 7) Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal.
 - 8) belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan.
 - 9) Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk budidaya belum optimal, seperti sawah untuk mina padi.
- d. Permasalahan terkait bidang ketahanan pangan
 - 1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan.
 - 2) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan, akibatnya seluruh peran dan kegiatan yang terkait dengan bidang ketahanan

- pangan belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
- 3) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang menangani bidang pangan dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya.
 - 4) Pola konsumsi masyarakat belum ideal dan diversifikasi pangan belum optimal.
 - 5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
 - 6) Lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan keluarga.
 - 7) Pangan olahan berbasis pangan lokal terkendala ketersediaan bahan baku, peralatan yang masih sederhana dan pemasaran yang terbatas.
 - 8) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan pangan guna mengolah bahan pangan berbasis sumberdaya lokal.
 - 9) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat (produsen/konsumen) terhadap pentingnya keamanan pangan.
 - 10) Belum optimalnya kontrol terhadap penggunaan pestisida dan bahan-bahan tambahan pangan (BTP) lainnya.
 - 11) Masih kurangnya praktek-praktek sanitasi dan hygiene pada pedagang makanan.
 - 12) Belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang keamanan pangan.
 - 13) Belum semua desa memiliki Lumbung Pangan untuk cadangan pangan, sehingga peran cadangan pangan masyarakat belum optimal.
 - 14) Belum adanya data keluar masuk pangan strategis dari dan ke Kabupaten Banjarnegara.
 - 15) Kondisi geografis daerah pegunungan yang rawan bencana

e. Permasalahan terkait bidang penyuluhan pertanian

- 1) Semakin berkurangnya tenaga penyuluh lapangan di karenakan pension.
- 2) Masih kurang prasarana dan sarana di Balai Penyuluh Lapangan di kecamatan.
- 3) Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya petugas penyuluh lapangan.

f. Permasalahan terkait sekretariat

- 1) Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas.
- 2) Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.
- 3) Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia baik jumlah maupun mutunya

B. Telaah Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra

1. Telaah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 adalah: Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presedin , maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan Ketahanan pangan .
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 – 2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan .
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian .

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020 - 2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional,
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian,
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional,
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sesuai dengan tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian sasaran ke-: (1) meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional ; (3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional ; (4) Termanfaatkannya

inovasi dan teknologi pertanian ; (5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan; dan (6) Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.

2. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 - 2024

Visi KKP adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020 – 2024, KKP terutama melaksanakan empat misi KKP yakni:

- a. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”.
- b. “struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautana dan Perikanan Terhadap Perekonomian Nasional”
- c. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
- d. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, efektif, dan Terpercaya” melalui” Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai yaitu:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;

6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian sasaran strategis ke-1 sampai dengan sasaran strategis ke-8.

3. Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018 - 2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018 - 2023 adalah memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah

Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.

Berdasarkan sasaran strategis di atas, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

4. Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama Tahun 2019 – 2023, dijabarkan sebagai berikut: “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) Subsektor Peternakan”. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan subsektor peternakan (%) mencerminkan kinerja subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Tengah karena menunjukkan tren produksi peternakan dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi faktor harga.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatnya meningkatnya produksi daging, susu dan telur, dengan indikator sasarannya adalah jumlah produksi daging, susu dan telur di Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama Tahun 2013 – 2018 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara adalah sasaran meningkatnya produksi daging, susu dan telur.

5. Telaah Renstra Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai visi, yaitu: “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.”

Untuk mewujudkan visi yang telah dijelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Misi:

- 1) Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- 3) Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni :
 - a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - b. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni :
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
 - b. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
 - c. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
 - a. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai Oleh KKP adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP
4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif.
5. Terselenggaranya tata Kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan.
6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif .
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian
8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses
9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yakni sasaran 1 sampai sasaran 6.

6. Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah yaitu : “Menjadi Lembaga Yang Handal Dan Profesional Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuji Kemandirian Jawa Tengah ” dengan misi :

- 1) Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi;.
- 2) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

- 3) Pengembangan meningkatkan penganekaragaman mutu pangan.

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan.

Tujuan Dishanpan Provinsi Jawa Tengah adalah 1). meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan 2) Meningkatkan tata Kelola organisasi perangkat daerah

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai tahun 2018-2023 meliputi:

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara yaitu sasaran 1 . Dengan sasaran tersebut maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan baik dari Kabupaten, Provinsi maupun dari kementerian dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

C. Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Untuk itu,

dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang; Struktur tata ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Banjarnegara Tahun 2011-2031, Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas: a. kawasan tanaman pangan; b. kawasan hortikultura; c. kawasan peternakan; dan d. kawasan perkebunan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas: a. lahan irigasi; dan b. lahan bukan irigasi. Lahan irigasi dengan luas kurang lebih 13.294 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Banjarmangu;
- b. Kecamatan Banjarnegara;
- c. Kecamatan Bawang;
- d. Kecamatan Kalibening;
- e. Kecamatan Karangobar;
- f. Kecamatan Mandiraja;
- g. Kecamatan Madukara;
- h. Kecamatan Pagedongan;
- i. Kecamatan Pagentan;
- j. Kecamatan Punggelan;
- k. Kecamatan Purwanegara;
- l. Kecamatan Purwareja Klampok;
- m. Kecamatan Rakit;
- n. Kecamatan Sigaluh;
- o. Kecamatan Susukan;
- p. Kecamatan Wanadadi; dan
- q. Kecamatan Wanayasa.

Lahan bukan irigasi dengan luas kurang lebih 5.785 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Batur;
- b. Kecamatan Bawang;
- c. Kecamatan Kalibening;
- d. Kecamatan Banjarnegara;

- e. Kecamatan Mandiraja;
- f. Kecamatan Madukara;
- g. Kecamatan Pagedongan;
- h. Kecamatan Pagentan;
- i. Kecamatan Pandanarum;
- j. Kecamatan Karangobar;
- k. Kecamatan Pejawaran;
- l. Kecamatan Punggelan;
- m. Kecamatan Purwanegara;
- n. Kecamatan Purwareja Klampok;
- o. Kecamatan Rakit;
- p. Kecamatan Sigaluh;
- q. Kecamatan Susukan;
- r. Kecamatan Wanadadi; dan
- s. Kecamatan Wanayasa.

Lahan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 12.147 (dua belas ribu seratus empat puluh tujuh) hektar.

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 56.573 (lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Banjarmangu;
- b. Kecamatan Banjarnegara;
- c. Kecamatan Batur;
- d. Kecamatan Bawang;
- e. Kecamatan Kalibening;
- f. Kecamatan Karangobar;
- g. Kecamatan Madukara;
- h. Kecamatan Mandiraja;
- i. Kecamatan Pagedongan;
- j. Kecamatan Pagentan;
- k. Kecamatan Pandanarum;
- l. Kecamatan Pejawaran;
- m. Kecamatan Punggelan;
- n. Kecamatan Purwanegara;

- o. Kecamatan Purwareja Klampok;
- p. Kecamatan Rakit;
- q. Kecamatan Sigaluh;
- r. Kecamatan Susukan;
- s. Kecamatan Wanadadi; dan
- t. Kecamatan Wanayasa.

Kawasan peternakan terdiri atas :

- a. pengembangan ternak besar;
- b. pengembangan ternak kecil;
- c. pengembangan unggas; dan
- d. pengembangan aneka ternak.

Pengembangan ternak besar dan pengembangan ternak kecil terdapat di seluruh kecamatan. Sementara itu pengembangan ternak unggas meliputi :

- a. Kecamatan Mandiraja;
- b. Kecamatan Purwanegara;
- c. Kecamatan Wanadadi;
- d. Kecamatan Banjarmangu;
- e. Kecamatan Banjarnegara;
- f. Kecamatan Madukara;
- g. Kecamatan Rakit;
- h. Kecamatan Punggelan;
- i. Kecamatan Pagentan;
- j. Kecamatan Pejawaran; dan
- k. Kecamatan Wanayasa.

Pengembangan aneka ternak berada di seluruh Kecamatan. Pengembangan kegiatan ternak besar, ternak kecil, unggas, dan aneka ternak pelaksanaannya diarahkan pada lahan pertanian bukan irigasi dan hortikultura.

Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 72.568 (tujuh uluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar berupa perkebunan rakyat.

Pengembangan komoditas perkebunan rakyat meliputi :

- a. purwaceng;
- b. carica;
- c. aren;

- d. cengkeh;
- e. gelagah arjuna;
- f. kakao;
- g. kapuk randu;
- h. kapulaga;
- i. kayu manis;
- j. kelapa dalam;
- k. kelapa deres;
- l. kelapa hibrida;
- m. kemukus;
- n. kina;
- o. kopi arabika;
- p. kopi robusta;
- q. lada;
- r. melati gambir;
- s. pala;
- b. panili;
- c. nilam
- d. teh; dan
- e. karet.

Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan darat meliputi :

- a. Kecamatan Rakit;
- b. Kecamatan Mandiraja.
- c. Kecamatan Purwanegara;
- d. Kecamatan Bawang; dan
- e. Kecamatan Wanadadi.

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan tidak terindikasi

menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pertanian dan Perikanan memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya di bidang pertanian terkait dengan penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia pertanian dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1. Pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani masih perlu ditingkatkan, pengembangan usaha peternakan dimasyarakat dengan, serta meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan nelayan.
2. Belum optimalnya produksi pertanian dan produktivitas pertanian serta populasi ternak, termasuk pengembangan pertanian organik.
3. Belum optimalnya manajemen dan kelembagaan usaha tani
4. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air serta dampak perubahan iklim.
5. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan perkebunan karena belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
6. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi serta akses pasar.
7. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani.
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian.
9. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya walaupun potensi lahan untuk budidaya tersedia.

10. Adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya air untuk budidaya perikanan dengan sektor yang lain.
11. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM petugas teknis.
12. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hayati perikanan dipengaruhi penurunan kualitas perairan umum dan perilaku masyarakat di sekitar DAS yang belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
13. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan.
14. Peningkatan ketersediaan, cadangan dan distribusi pangan
15. Penanganan kerawanan pangan belum optimal.
16. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman konsumsi pangan
17. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya pengelolaan pangan
18. Pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal
19. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
20. Diperlukannya penataan dan integrasi system informasi pertanian sebagai jalan menuju digitalisasi pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); telah ditetapkan Visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjarnegara, dengan Visi adalah “ **BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN** “ , dengan misi Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kesempatan lapangan berusaha sektor pertanian dan perikanan
- 2) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis.
- 2) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis
- 3) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan
- 4) Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
- 5) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian , perikanan.
- 6) Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan.
- 7) Meningkatkan kelembagaan petani dan penyuluhan.
- 8) Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha sektor pertanian dan perikanan	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis	peningkatan ketersediaan dan produksi pangan strategis	PROGRAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	%	100	100	100	100	100	100
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan	unit						
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase terlaksananya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	100					
								100	100	100	100	100

				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	tersedianya laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	laporan						
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	tersedianya laporan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten	laporan						
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	tersedianya laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	laporan						
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100	100	100	100
				Penyusunan Peta Kerenatanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	terlaksananya penyusunan peta kerenatanan dan ketahanan pangan	laporan						

				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	laporan						
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Penggunaan Sarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan,	%	98	100	100	100	100	100
					Prosentase Penggunaan Sarana pertanian bidang tanaman pangan,	%	98	100	100	100	100	100
					Prosentase Penggunaan Sarana pertanian bidang peternakan	%	98	100	100	100	100	100
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Penyediaan Benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah								

kabupaten/kota lainnya										
	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis	persentase keamanan dan mutu pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	100	85	85	85	85
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	laporan	1	1	1	1	1
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Penggunaan Sarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan,	%	98	100	100	100	100
				Prosentase Penggunaan Sarana pertanian bidang tanaman pangan,	%	98	100	100	100	100
				Prosentase Penggunaan Sarana pertanian bidang peternakan	%	98	100	100	100	100

			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	terlaksananya peyediaan benih/bibit ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten							
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten	laporan	1	1	1	1	1	1
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan	%	93	100	100	100	100	100
				Prosentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian bidang tanaman pangan	%	93	100	100	100	100	100
				Prosentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian bidang peternakan	%	93	100	100	100	100	100

				Pengembangan Prasarana Pertanian	terlaksananya pengembangan prasarana pertanian							
				Pembangunan Prasarana Pertanian	terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	unit		10	15	20	25	25
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten	kecamatan	4	4	4	4	4	4
				PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	prosentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya	%	100	100	100	100	100	100
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	unit	10	10	10	10	10	10
				PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	prosentase produksi perikanan tangkap	%	100	100	100	100	100	100
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah/kabupate	unit	Prasarana 10 unit, sarana 10 unit	Prasarana 15 unit, sarana 15 unit	Prasarana 20 unit, sarana 20 unit	Prasarana 25 unit, sarana 25 unit	Prasarana 70 unit, sarana 70 unit	

			Kabupaten/Kota	n													
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	prosentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner													
	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan	persentase serangan OPT			%	92	100	100	100	100	100	100	100				
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	laporan n	1	1	1	1	1	1	1	1				1
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten													
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	laporan n	1	1	1	1	1	1	1	1				1

			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	laporan	1	1	1	1	1	1	1
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan penanggulan bencana petanian	%	90	100	100	100	100	100	100
			Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Kabupaten	paket	3	3	3	3	3	3	3
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan	%	100	100	100	100	100	100	100
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sumber daya perikanan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1

			lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten / kota							
	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Peningkatan daya saing komoditas pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase pembinaan kelembagaan kelompok tani	%	60,72	100	100	100	100
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksanannya penyuluhan pertanian	kecamatan		20	20	20	20
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya	%	100	100	100	100	100
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	terlaksanannya pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	kelom pok	14	20	20	20	20
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil	%	100	100	100	100	100
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	dokum en	1	1	1	1	1

			Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten						
			PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase produksi perikanan tangkap	%	100	100	100	100	100
			Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil	orang	100	150	200	250	700
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan penunjang urusa pemerintahan daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai)	tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	9	9	9	9
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	12	12	12
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	12	12
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	12	12

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Distankan dan KP serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, sehingga dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian, perikanan dan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha sektor pertanian dan	Meningkatnya Ketersediaan pangan strategis	• Meningkatkan produksi perikanan, produktivitas pertanian dan populasi ternak • Meningkatkan ketersediaan cadangan dan	• Peningkatan pembinaan kelompok tani, dalam penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokal di bidang pertanian • Peningkatan fasilitasi inseminasi buatan

perikanan		distribusi pangan • Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal • Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat • Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian, peternakan dan perikanan dalam perbenihan perikanan • Meningkatkan pelestarian sumberdaya genetik ternak	pada ternak • Peningkatan kemampuan teknis dan kelembagaan petani • Pengembangan pusat pembibitan rakyat Domba Batur • Peningkatan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi perbenihan tepat guna dan spesifik lokal di bidang perikanan • Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA • Peningkatan Ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat • Pengembangan cadangan pangan pemerintah • Pengembangan Toko Tani Indonesi (TTI) • Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis
	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis	• Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan yang aman dan terjamin mutunya • Meningkatkan	• Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan • Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar

		pembinaan dan pengawasan keamanan pangan baik dari produk pertanian, produk perikanan, produk hortikultura, produk perkebunan dan produk peternakan • Meningkatkan mutu produk hasil pertanian dan perikanan	• Pengembangan Pengolahan Pasca panen dan hasil pengolahan pangan local • Penerapan sistem manajemen mutu dalam proses budidaya dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan
	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	• Menjamin kebutuhan sarana produksi pertanian tanaman pangan , peternakan, perikanan, perkebunan dan hortikultura tersedia dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat • Menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang memadai	• Fasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan pada wilayah pengembangan • Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan, hortikultura dan peternakan pada wilayah pengembangan
	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan	• Meningkatkan pengendalian penyakit hewan • Meningkatkan pengendalian OPT	• Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonosis

	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, perikanan	• Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan • Mengembangkan jaringan pemasaran hasil pertanian dan perikanan • Memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan miskin	• Peningkatan fasilitasi prasarana, sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan • Peningkatan fasilitasi bisnis dan promosi hasil pertanian dan perikanan • Peningkatan kemampuan dan fasilitasi sarana produksi pertanian dan perikanan
	Meningkatnya upaya penanggulan kemiskinan	• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan dan fasilitasi kepada masyarakat yang terkena rawan transien (bencana)	• Penanganan daerah rawan pangan • Pengembangan Desa Mandiri Pangan
	Meningkatkan kelembagaan petani dan penyuluhan	• Meningkatkan pembinaan kelembagaan kelompok tani • Meningkatkan kualitas penyuluh	• Meningkatkan pembinaan kelembagaan kelompok tani • Meningkatkan kualitas penyuluh
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan	• Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan perikanan • Meningkatkan penerapan standar pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan	• Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan perikanan yang akuntabel • Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang pelayanan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Uraian Nama program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

➤ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

- c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - e) Program Penyuluhan Pertanian
 - Pelaksanaan Penyuluhan
2. Urusan Perikanan dan Kelautan
- a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - c) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - d) Program Pemasaran Hasil Perikanan
 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Pembinaan mutu dan keamanan hhasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

3. Urusan Pangan

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian pangan

- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

c) Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

d) Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

B. Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026 tercantum pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi i Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2021)	Tahun-1 (2023)								Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Tahun terakhir RPD (2026)	
				Tahun-1 (2023)				Tahun-2 (2024)				Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Tahun terakhir RPD (2026)			
				TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksana kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	24.945.000.000	100%	27.439.500.000	100%	30.183.450.000	100%	33.201.795.000	100%	33.201.795.000	100%	33.201.795.000				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	42.350.000	100%	46.585.000	100%	46.585.000	100%	46.585.000				
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	15.000.000	7 dok	16.500.000	7 dok	18.150.000	7 dok	19.965.000	7 dok	19.965.000	7 dok	19.965.000				

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	66.550.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	50.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	60.500.000	12 laporan	66.550.000	12 laporan	66.550.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	700.000.000	100%	770.000.000	100%	847.000.000	100%	931.700.000	100%	931.700.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	150.000.000	1 paket	165.000.000	1 paket	181.500.000	1 paket	199.650.000	1 paket	199.650.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	1 paket	732.050.000	1 paket	732.050.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik	100%	100%	2.050.000.000	100%	2.225.000.000	100%	2.480.500.000	100%	2.728.550.000	100%	2.728.550.000

			Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	450.000.000	12 laporan	495.000.000	12 laporan	544.500.000	12 laporan	598.950.000	12 laporan	658.845.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	450.000.000	12 laporan	495.000.000	12 laporan	544.500.000	12 laporan	598.950.000	12 laporan	658.845.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.600.000.000	12 laporan	1.760.000.000	12 laporan	1.936.000.000	12 laporan	2.129.600.000	12 laporan	2.342.560.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	423.500.000	100%	465.850.000	100%	465.850.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100.000.000	10 unit	110.000.000	32 unit	121.000.000	10 unit	133.100.000	10 unit	133.100.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	32 unit	32 unit	250.000.000	32 unit	275.000.000		302.500.000	32 unit	332.750.000	32 unit	332.750.000

3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	98%	100%	3.270.000.000	100%	3.597.000.000	100%	3.956.700.000	100%	4.352.370.000	100%	4.352.370.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tertaksananya pelaksanaan penggunaan sarana pertanian	95,5 %	95,5 %	1.600.000.000	95,5 %	1.760.000.000	95,5 %	1.936.000.000	95,5 %	2.129.600.000	95,5 %	2.129.600.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 paket	2 paket	1.500.000.000	2 paket	1.650.000.000	2 paket	1.815.000.000	2 paket	1.996.500.000	2 paket	1.996.500.000
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 kelompok	2 kelompok	100.000.000	2 kelompok	110.000.000	2 kelompok	121.000.000	2 kelompok	133.100.000	2 kelompok	133.100.000
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	10 kelompok	10 kelompok	250.000.000	10 kelompok	275.000.000	10 kelompok	302.500.000	10 kelompok	332.750.000	10 kelompok	366.025.000

	Pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	10 kelompok	10 kelompok	250.000.000	10 kelompok	275.000.000	10 kelompok	302.500.000	10 kelompok	332.750.000	10 kelompok	366.025.000
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten	100 %	100 %	400.000.000	100 %	440.000.000	100 %	484.000.000	100 %	532.400.000	100 %	532.400.000
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	32 kelompok	32 kelompok	400.000.000	35 kelompok	440.000.000	40 kelompok	484.000.000	45 kelompok	532.400.000	45 kelompok	532.400.000
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Terlaksananya a pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	26.620.000
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 paket	1 paket	20.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	24.200.000	1 paket	26.620.000	1 paket	26.620.000
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam	Terlaksananya a pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	100%	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	665.500.000

			Daerah Kabupaten/Kota	Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten															
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Tersedia	1 paket	1 Paket	500.000.000	1 paket	550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	1 paket	665.500.000				
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya a. Penyediaan benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	1 paket	250.000.000	1 paket	275.000.000	1 paket	302.500.000	1 paket	332.750.000	1 paket	366.025.000				
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	1 paket	250.000.000	1 paket	275.000.000	1 paket	302.500.000	1 paket	332.750.000	1 paket	366.025.000				
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Penggunaan prasarana Pendukung Pertanian	93%	100%	28.773.000.000	100%	14.655.000.000	100%	9.680.000.000	100%	10.209.375.000	100%	11.712.800.000				
	7	3	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya a. pengembangan prasarana pertanian	90 %	100 %	750.000.000	100 %	825.000.000	100 %	907.500.000	100 %	998.250.000	100 %	998.250.000				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	2 kegiatan	2 kegiatan	750.000.000	2 kegiatan	825.000.000	2 kegiatan	907.500.000	2 kegiatan	998.250.000	2 kegiatan	998.250.000				

			Pertanian Lainnya											
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya a pembangunan prasarana pertanian	95 %	100%	7.250.000 .000	100%	7.975.000.000	100%	8.772.500.000	100%	9.211.125.000	100%	9.211.12 5.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0	4.000 m	1.000.000.000	4.400 m	1.100.000.000	4.800 m	1.210.000.000	5.300 m	1.331.000.000	5.800 m	1.464.100.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	4 unit	500.000.000	4 unit	550.000.000	5 unit	605.000.000	5 unit	665.500.000	6 unit	732.050.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	56 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	56 lokasi	5 km	2.500.000.000	5,5 km	2.750.000.000	6 km	3.025.000.000	6,6 km	3.327.500.000	7,2 km	3.660.250.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 unit	6 unit	750.000.000	6 unit	825.000.000	7 unit	907.500.000	7 unit	998.250.000	8 unit	1.098.075.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	4 unit	2.000.000.000	4 unit	2.200.000.000	4 unit	2.420.000.000	4 unit	2.662.000.000	4 unit	2.928.200.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0		300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten	90%	100%	20.773.000.000	100 %	5.855.000.000	0	0	0	0	0	0-
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	4 kec.	4 kec	20.773.000.000	4 kec	5.855.000.000	0	0	0	0	0	0-
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	92%	100%	290.000.000	100%	467.500.000	100%	514.250.000	100%	565.675.000	100%	622.242.500

	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	92%	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100 %	99.825.000
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 paket	1 paket	75.000.000	1 paket	82.500.000	1 paket	90.750.000	1 paket	99.825.000	1 paket	99.825.000
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten	70 %	100%	15.000.000	100%	165.000.000	100 %	181.500.000	100 %	199.650.000	100%	199.650.000
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	21 orang	30 orang	15.000.000	100 orang	165.000.000	100 orang	181.500.000	100 orang	199.650.000	100 orang	199.650.000

	Pengelolaan Jasa Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Pengelolaan a Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100 %	121.000.000	100 %	133.100.000	100%	133.100.000
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	110.000.000	1 paket	121.000.000	1 paket	133.100.000	1 paket	133.100.000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya a Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %	100.000.000	100 %	110.000.000	100 %	121.000.000	100 %	133.100.000	100 %	133.100.000
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	19 tempat	19 tempat	75.000.000	20 tempat	82.500.000	20 tempat	90.750.000	20 tempat	99.825.000	20 tempat	99.825.000
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 paket	1 paket	25.000.000	1 paket	27.500.000	1 paket	30.250.000	1 paket	33.275.000	1 paket	33.275.000

3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	90%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulan an Bencana Pertanian Kabupaten	90%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 paket	3 paket	400.000.000	3 paket	400.000.000	3 paket	400.000.000	4 paket	430.000.000	4 paket	430.000.000
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulan an Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	175.000.000	1 laporan	175.000.000

3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kenaikan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	66,72%	100%	700.000.0 00	100%	770.000.0 00	100%	847.000.000	100%	931.700.0 00	100%	931.700 .000
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya a pelaksanaan penyuluhan	66,72%	100%	700.000.0 00	100%	770.000.0 00	100%	847.000.000	100%	931.700.0 00	100%	931.700. 000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 kec.	20 kec.	200.000.00 0	20 kec.	220.000.00 0	20 kec.	242.000.000	20 kec.	266.200.00 0	20 kec.	266.200. 000
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	9 kec.	9 kec.	500.000.00 0	9 kec.	550.000.00 0	9 kec.	605.000.000	9 kec.	665.500.00 0	9 kec.	665.500. 000
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2	9	0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	100%	100%	2.050.000. 000	100%	2.325.000. 000	100%	2.557.500.00 0	100%	2.813.250. 000	100%	2.813.25 0.000

	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten	100%	100%	2.050.000.000	100%	2.325.000.000	100%	2.557.500.000	100%	2.813.250.000	100%	2.813.250.000
	Penyediaan Infrastruktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0	2 unit	1.000.000.000	2 unit	1.100.000.000	3 unit	1.210.000.000	4 unit	1.331.000.000	4 unit	1.331.000.000
	Penyediaan Infrastruktur lantai jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	0	3 unit	750.000.000	4 unit	825.000.000	5 unit	907.500.000	5 unit	998.250.000	5 unit	998.250.000
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 paket	2 paket	300.000.000	3 paket	400.000.000	3 paket	440.000.000	4 paket	484.000.000	4 paket	484.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase terlaksananya diversifikasi dan ketahanan pangan	100%	100%	1.150.000.000	100%	1.325.000.000	100%	1.457.500.000	100%	1.603.250.000	100%	1.603.250.000
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	100 %	100%	600.000.000	100%	630.000.000	100%	661.500.000	100%	694.575.000	100%	694.575.000

	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33.500 kg	35.000 kg	300.000.000	37.500 kg	400.000.000	40.000 kg	440.000.000	45.000 kg	484.000.000	45.000 kg	484.000.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	a. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100 %	100 %	250.000.000	100 %	275.000.000	100 %	302.500.000	100 %	332.750.000	100 %	332.750.000
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	121.000.000	1 dokumen	133.100.000	1 dokumen	133.100.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 kelompok	20 kelompok	150.000.000	20 kelompok	165.000.000	20 kelompok	181.500.000	20 kelompok	199.650.000	20 kelompok	199.650.000
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase penanganan kerawanan pangan	100%	100%	175.000.000	100%	192.500.000	100%	211.750.000	100%	232.925.000	100%	256.217.500

		Penyusunan Peta Kerenanan dan Ketahana Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerenanan dan Ketahana Pangan Kecamatan	100 %	100 %	75.000.000	100 %	82.500.000	100 %	90.750.000	100 %	99.825.000	100 %	99.825.000
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerenanan dan kerenanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerenanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 peta	1 peta	75.000.000	1 peta	82.500.000	1 peta	90.750.000	1 peta	99.825.000	1 peta	99.825.000
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	133.100.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	3 kali	3 kali	100.000.000	3 kali	110.000.000	4 kali	121.000.000	4 kali	133.100.000	4 kali	133.100.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	prosentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	100%	85%	250.000.000	85%	280.500.000	85%	308.550.000	85%	339.405.000	85%	339.405.000
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	100%	85%	255.000.000	85%	280.500.000	85%	308.550.000	85%	339.405.000	85%	339.405.000

		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	60 orang	60	50.000.000	60 orang	55.000.000	60 orang	60.500.000	60 orang	66.550.000	60 orang	66.550.000
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17 buah	17 buah	55.000.000	20 buah	60.500.000	20 buah	66.550.000	20 buah	73.205.000	20 buah	73.205.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 paket	20 paket	150.000.000	20 paket	165.000.000	22 paket	181.500.000	23 paket	199.650.000	23 paket	199.650.000
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						-		-				
3	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Prosentase produksi perikanan tangkap	100%	100%	500.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.175.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat												

			Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota															
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3 unit	0	0	4 unit	500.000.000	5 unit	550.000.000	6 unit	600.000.000	6 unit	600.000.000			
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	21 paket	19 paket	500.000.000	20 paket	575.000.000	21 paket	625.000.000	22 paket	700.000.000	22 paket	700.000.000			
3	2	0	PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	prosentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya	100%	100%	2.550.000.000	100%	2.725.000.000	100%	2.997.500.000	100%	3.297.250.000	100%	3.626.975.000			
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tertaksanannya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000			
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 RTM	10 RTM	150.000.000	10 RTM	165.000.000	10 RTM	181.500.000	10 RTM	199.650.000	10 RTM	199.650.000			
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	100%	2.400.000.000	100%	2.560.000.000	100%	2.816.000.000	100%	3.097.600.000	100%	3.097.600.000			

	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 unit	3 unit	1.000.000.000	3 unit	1.100.000.000	4 unit	1.210.000.000	4 unit	1.331.000.000	4 unit	1.331.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21 paket	21 paket	800.000.000	21 paket	800.000.000	23 paket	880.000.000	24 paket	968.000.000	24 paket	968.000.000
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 paket	13 paket	500.000.000	15 paket	550.000.000	17 paket	605.000.000	19 paket	665.500.000	19 paket	665.500.000
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	24 kelompok	24 kelompok	100.000.000	24 kelompok	110.000.000	24 kelompok	121.000.000	24 kelompok	133.100.000	24 kelompok	133.100.000
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000

	Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100 %	332.750.000
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	27,45%	27,45%	250.000.000	27,45%	275.000.000	27,45%	302.500.000	27,45%	332.750.000	27,45%	366.025.000
	Jumlah				59.340.000.000		54.827.000.000		53.869.200.000		58.817.495.000		58.817.495.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan RPD. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2023 - 2026. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 - 2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022
			2023	2024	2025	2026	
1	peningkatan ketersediaan, produktivitas pangan strategis, produksi ikan dan populasi ternak						
	- Produktivitas padi (ton/ha)	6,49	6,61	6,68	6,74	6,81	6,55
	- Produktivitas jagung (ton/ha)	6,88	7,01	7,08	7,15	7,23	6,94
	- Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,30	1,32	1,33	1,35	1,36	1,31
	- Produktivitas ubi kayu (ton/ha)	23,85	24,32	24,57	24,81	25,06	24,08
	- Produktivitas Durian (kg/ha)	14.649	23.040,50	23.386,11	23.736,90	24.092,95	22.700,00
	- Produktivitas Salak (kg/ha)	2.200	2.537,50	2.575,56	2.614,20	2.653,41	2.500
	- Produktivitas Cabai Besar (kg/ha)	7.235,00	5.773,32	5.859,92	5.947,82	6.037,04	5.688,00
	- Produktivitas Cabai Rawit (kg/ha)	3.938,00	2.893,77	2.937,17	2.981,23	3.025,95	2.851,00
	- Produktivitas Kentang (kg/ha)	19.875,00	19.287,97	19.577,29	19.870,95	20.169,01	19.002,92
	- Produktivitas Kopi Arabika (kg/ha)	821,22	973,54	988,14	1.002,96	1.018,01	959,15
	- Produktivitas Kopi Robusta (kg/ha)	688,02	1.019,08	1.034,36	1.049,88	1.065,63	1.004,02
	- Produktivitas Kelapa Deres (kg/ha)	1.005,65	1.416,20	1.437,44	1.459,00	1.480,89	1.395,27
	- Produktivitas Kelapa Dalam (kg/ha)	6.453,39	4.520,38	4.588,19	4.657,01	4.726,87	4.453,58
	- Produktivitas Teh (kg/ha)	1.419,72	1.721,77	1.747,59	1.773,81	1.800,42	1.696,32
	- Produktivitas Tembakau (kg/ha)	624,03	533,38	541,38	549,50	557,75	525,50
	- Produksi perikanan budidaya	38.282,62	38.761,152	39.245,67	39.736,24	40.232,94	40.232,94
	- Produksi perikanan tangkap	1253,85	794,45	804,51	814,69	825	825
	- Produksi benih ikan (ekor)	2.436.476.082	2.466.932.033,02	2.497.768.953,43	2.528.991.065,34	2.560.603.453,65	2.560.603.453,65
	- Populasi sapi (satuan ternak)	31.340	31.731,75	32.128,39	32.529,99	32.936,61	32.936,61
	- Populasi kambing domba (satuan ternak)	209.278	211.893,98	214.542,65	217.224,43	219.939,73	219.939,73
	- Populasi domba batur (satuan ternak)	70.114	70.990,43	71.877,81	72.776,28	73.685,98	73.685,98
	- Produksi daging (kg)	7.502.708.63	7.502.708.63	7.502.708.63	7.502.708.63	7.502.708.63	7.502.708.63

	- ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	3.339	2400	2400	2400	2400	2400
	- ketersediaan protein (gr/kap/hari)	73,44	65	65	65	65	65
	- Jumlah cadangan pangan daerah (gabah) yang,67 tersedia (ton)	33	35 ton	35 ton	35 ton	35 ton	35 ton
	- Prosentase terlaksananya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (%)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	- Prosentase fasilitasi Penanganan kerawanan pangan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Skor Pola Pangan harapan	89	91,6	91,7	91,8	91,9	91,9
2	persentase keamanan dan mutu pangan						
	- Prosentase pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terkendalinyapenyebara n organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Tanaman serta penyakit pada hewan dan ikan						
	- Persentase serangan OPT dan DPI ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan/ikan menular strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan daya saing komoditas pertanian						
	- Jumlah Fasilitasi prasarana-sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (kelompok/tahun)	12	10	10	10	10	20
7	Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan						

	- Cakupan Bina Kelompok	66,72%	48,41%	43,72%	40,38%	36,81%	58,79%
	- Peningkatan Kelas Kelompok Tani	P → L : 402 L → M : 268 M → U : 134	P → L : 312 L → M : 208 M → U : 104	P → L : 288 L → M : 192 M → U : 96	P → L : 273 L → M : 182 M → U : 91	P → L : 255 L → M : 170 M → U : 85	P → L : 366 L → M : 244 M → U : 122
8	Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan						
	- Jumlah Rumah Tangga Miskin yang tertangani	20 RTM	30 RTM	30 RTM	30 RTM	30 RTM	30 RTM
9	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai)						
	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai)	79,28	80,27	81,27	82,29	82,35	82,35
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (%)	68,63	69,49	70,36	71,24	71,95	71,95

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama empat tahun ke depan. Masa berlaku Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah selama empat tahun, karena merupakan Renstra transisi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dikarenakan belum adanya Bupati maupun Wakil Bupati .

Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi “BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN “. Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program / kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Renja selama kurun waktu empat tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat direview kembali.

B. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Renja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan

Pangan, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025.

Banjarnegara,

2022

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara


Totok Setya Winarna, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198903 1 006